

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) Sebagai Saksi dan/atau Korban dalam Tindak Pidana Gratifikasi Seksual

ABSTRAK

Prostitusi merupakan salah satu permasalahan hukum yang terjadi dan tidak lepas dari faktor ekonomi di dalam kehidupan sehari-hari. PSK dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya dikarenakan penghasilan yang mereka dapatkan tidak seberapa dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, adanya beberapa faktor penghambat seperti pendidikan yang rendah, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi, dan pengaruh lingkungan sosial dinilai juga menjadi pemicu bagi mereka untuk beralih profesi menjadi seorang PSK. Di Indonesia, larangan praktik prostitusi dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, akan tetapi nyatanya aturan-aturan tersebut dirasa belum sepenuhnya efektif dan membuat jera para penyedia jasa PSK, PSK, maupun pemakai jasa PSK itu sendiri. Di samping tindak pidana suap, kini istilah gratifikasi juga mulai muncul ke permukaan publik. Selain karena melibatkan oknum pejabat atau penyelenggaranegara, frasa 'fasilitas lainnya' yang tercantum dalam pengertian UU Tipikor tersebut dinilai menimbulkan keaburan pemahaman bagi sebagian orang. Melalui penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait gratifikasi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada PSK yang terlibat dalam tindakpidanagratiifikasi seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PSK. Sementara itu terkait metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta teknik analisis data yaitu studi kepustakaan.

Kata kunci: korupsi, gratifikasi, prostitusi, saksi, korban.

The Urgency of Legal Protection For Prostitutes as Witnesses and/or Victims in Criminal Acts of Sexual Gratification

ABSTRACT

Prostitution is one of the legal problems that occurs and cannot be separated from economic factors in everyday life. Prostitutes are required to fulfill their living needs for those of their families because the income they earn is not much and it is difficult to get decent work. Apart from that, the existence of several inhibiting factors such as low education, unmet biological needs, and the influence of the social environment are also considered to be triggers for them to change professions to become prostitutes. In Indonesia, prohibitions on the practice of prostitution can be seen in several laws and regulations, but in reality these regulations are not felt to be fully effective and are a deterrent to providers of prostitute services, prostitutes, and users of prostitute services themselves. Apart from the criminal act of bribery, now the term gratification is also starting to emerge in public. Apart from involving officials or state administrators, the phrase 'other facilities' contained in the meaning of the Corruption Law is considered to cause unclear understanding for some people. Through this research, the author will examine in more depth related to gratification and the legal protection provided to prostitutes who are involved in criminal acts of sexual gratification. The aim of this research is to find out how efforts to fulfill legal protection are carried out by the government for prostitutes. Regarding research methods, the type of research used by the author is normative juridical, with a statutory approach, and literature study as a data analysis technique.

Keywords: corruption, gratification, prostitution, witness, victim.